

VOLATILITAS PEMILIH DAN INTERSEP POLITIK DALAM PEMILU DPRD KABUPATEN DEMAK 2004-2019

Joko Juli Prihatmoko ¹, Agus Riyanto ²

Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia^{1,2}

E-mail: jokopri_smg@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui volatilitas partai-partai politik, menemukan dinamika di balik volatilitas, termasuk pola intersep atau perpindahan pilihan politik berdasarkan pembelahan sosial pemilih partai pada pemilu DPRD Demak tahun 2004-2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dikombinasikan dengan kualitatif in numeric dengan pendekatan deskriptif. Dari penelitian diketahui indeks volatilitas pemilu DPRD Demak tinggi dan fluktuatif, dengan rata-rata 34,26 dalam empat pemilu terakhir. Pemilu 2004, indeks volatilitas sebesar 53,36, menurun menjadi 22,93 pada Pemilu 2014, dan kembali naik menjadi 26,51 pada Pemilu 2019. Perbandingan tingkat electoral volatility itu memperlihatkan perbedaan stabilitas pola kompetisi antar partai di daerah tersebut yang lebih jauh membawa konsekuensi terhadap politik demokrasi lokal. Sedang tingginya volatilitas menunjukkan lemahnya relasi partai dan konstituen, pelembagaan partai, dan ID Party, yang membawa hasil pemilu yang kurang stabil sekaligus menunjukkan electoral market yang lebih terbuka dan tidak dapat diprediksi. Volatilitas suara yang tinggi berhubungan secara timbal balik dengan intersep politik, dimana partai yang satu memintas atau memotong (pertumbuhan) partai lain. Semula intersep politik terjadi lintas dan antarpartai kelompok kebangsaan atau keagamaan, dengan partai kelompok kebangsaan mendapatkan berkah limpahan suara dari partai keagamaan. Belakangan, seiring pelembagaan yang berefek pada stabilnya partai-partai kelompok keagamaan (PKB, PPP, dan PAN), intersep politik terjadi antarpartai kelompok kebangsaan. Perpindahan pilihan lebih mudah dilakukan pemilih partai-partai kebangsaan (PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, dan lain-lain). Hal itu mengonfirmasi keterbukaan electoral market partai-partai kelompok kebangsaan, yang memungkinkan munculnya partai baru dengan suara besar. Secara ekstrapolasi, perpindahan pilihan politik akan terus terjadi sejalan dengan peningkatan rasionalitas pemilih. Tantangan terbesarnya adalah pengaruh dan besaran kelompok pemilih rasional jauh di bawah pemilih rasional fanatik dan apalagi pemilih primordial. Selain itu, kondisi struktural menjadi barrier peningkatan rasionalitas pemilih seiring menguatnya kekuatan politik yang memelihara primordialisme untuk meraih maupun mempertahankan kekuasaan.

Kata Kunci: *Pemilu, volatilitas, intersep politik, elektabilitas, pembelahan.*

ABSTRACT

This study aims to determine the volatility of political parties, find the dynamics behind volatility, including intercept patterns or shifting political choices based on the social division of party voters in the 2004-2019 Demak DPRD elections. The type of research used is qualitative research combined with qualitative in numeric with a descriptive approach. The study found that the volatility index of the Demak DPRD elections was high and fluctuating, with an average of 34.26 in the last four elections. In the 2004 election, the volatility index was 53.36, declined to 22.93 in the 2014 election, and rose again to 26.51 in the 2019 election. The comparison of the level of electoral volatility shows differences in the stability of the pattern of competition between parties in the region, which further has consequences for local democratic politics. While high volatility shows the weakness of party and constituent relations, party institutionalization, and Party ID, which brings less stable election results while showing a more open and unpredictable electoral market. High vote volatility is reciprocally related to political intercepts, where one party bypasses or cuts off (growth) another party. Initially, political interception occurs across and between national or religious group parties, with national group parties getting the blessing of vote spillover from religious parties. Later, as the institutionalization of the religious group parties (PKB, PPP, and PAN) stabilized, political interception occurred between national group parties. It is easier for voters of national parties (PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, etc.) to switch their choices. This confirms the openness of the electoral market for national group parties, which allows the emergence of new parties with large votes. Extrapolating, the shift in political choices will continue to occur in line with the increase in voter rationality. The biggest challenge is that the influence and size of the rational voter group is far below the fanatical rational voters and especially primordial voters. In addition, structural conditions are a barrier to increasing voter rationality as political forces that maintain primordialism to gain and maintain power strengthen.

Keywords: *Election, volatility, political intercept, electability, cleavage.*

PENDAHULUAN

Empat kali pemilu di Kabupaten Demak menampilkan fenomena menarik. Partai-partai politik terpisah menjadi partai-partai kelompok keagamaan dan kelompok kebangsaan, berdasarkan kategorisasi pembilahan sosial Daniel Dhakidae, selanjutnya partai kebangsaan dan partai keagamaan (Dhakidae : 1999). Partai-partai berbasis keagamaan (Islam)

memperoleh suara yang relatif stabil dibandingkan partai-partai politik lain. Sebaliknya, partai-partai kebangsaan mengalami pasang naik dan pasang surut suara. Bahkan, partai baru berbasis kebangsaan yang berkompetisi pada pemilu perdananya bisa memperoleh suara yang cukup besar. Hal itu tidak ditemukan pada partai keagamaan baru.

Fenomena tersebut menunjukkan terjadinya perpindahan pendukung atau pemilih dari satu partai ke partai lain dalam pemilu. Perolehan suara dan kursi PKB dalam empat kali pemilu relatif besar dan paling stabil. Walaupun tidak sebesar PKB, suara PPP dalam tiga kali pemilu terakhir juga relatif stabil. Demikian pula PAN. Sebaliknya, stabilitas perolehan suara dan kursi tidak nampak pada PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Nasdem.

Namun dari empat pemilu, kemenangan dibagi rata antara PKB (partai keagamaan) dan PDIP (partai kebangsaan). Selebihnya, partai-partai baru yang berkompetisi pada pemilu perdananya bisa langsung mendapatkan suara yang besar, seperti Demokrat (Pemilu 2004), Gerindra (Pemilu 2009), dan Nasdem (Pemilu 2014).

Pada titik itulah, masalah perubahan suara partai politik, khususnya perubahan kesetiaan pemilih terhadap partai politik atau lazim disebut volatilitas, menarik dikaji. Tulisan ini meninjau dinamika volatilitas pemilih dari pemilu ke pemilu DPRD tahun 2004-2019 (2004, 2009, 2014, dan 2019) di Kabupaten Demak. Komparasi hasil pemilu dilakukan untuk menemukan penyebab dan akibat volatilitas, dan otomatis loyalitas, dengan memeriksa hubungan antar-sebab ataupun munculnya fenomena tertentu dalam jangkauan waktu sekarang (Nawawi, 1985: 63). Dalam hal ini akan dibandingkan; (1) Tingkat volatilitas pemilih partai pada

Pemilu 2004-2019. (2) Faktor-faktor yang menentukan perubahan pilihan para pemilih pada Pemilu 2004-2019. (3) Arah, ruang dan pola perpindahan pemilih pada Pemilu 2004-2019.

Dengan kajian terhadap empat pemilu, diharapkan terpotret kondisi dan pola tertentu dari variasi volatilitas pemilih yang bisa mendorong peningkatan pelembagaan partai, pemeliharaan relasi partai dan konstituen, dan memperkuat persepsi partai politik (*ID Party*). Pada akhirnya, dari kajian diharapkan ditemukan alternatif solusi untuk memperbaiki kerapuhan institusi baik dari rezim demokratis maupun sistem kepartaian, dan struktur pembilahan (*cleavage*) sosial di masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Volatilitas dan Karakter Pemilih

Volatilitas pilihan (*electoral volatility*) didefinisikan Scott Mainwaring sebagai gejala pergeseran kesetiaan pemilih dari satu partai ke partai lain; dari pemilihan ke pemilihan lain (Mainwaring, 1997: 61-62). Dalam bahasa lain, Roberts dan Wibbels menyebutnya sebagai agregat perubahan pilihan dari satu partai politik ke partai politik lain, dari satu pemilu ke pemilu selanjutnya yang merupakan fenomena yang banyak dihadapi oleh negara-negara demokrasi dan negara semi demokrasi di dunia (Roberts dan Wibbels, 1999). Mainwaring dan Torcal menggarisbawahi bahwa kebanyakan negara demokrasi dan semi demokrasi

di negara-negara berkembang mempunyai kecenderungan *electoral volatility* yang lebih tinggi dan stabilitas *electoral* yang lemah daripada di negara demokrasi industri maju (Mainwaring and Torcal, 2005).

Mainwaring menyebutkan bahwa “*with low volatility, electoral outcomes are stable from one election to the next, lending a high degree of predictability to a crucial aspect of democratic politics*”. Dampak lainnya adalah partai menjadi lebih berumur panjang, dan rakyat tahu apa yang mereka perjuangkan. Selain itu kesempatan munculnya partai baru menjadi tertutup, bukan secara hukum, namun karena rendahnya elektabilitas (Mainwaring, 1997)

Menurut Mainwaring, tingginya angka volatilitas membawa hasil pemilu yang tidak dapat diprediksi dan kurang stabil. Situasi itu bisa digambarkan dengan partai-partai besar dapat menderita kehilangan suara yang besar, sementara partai baru bisa secara tiba-tiba memperoleh suara yang besar. Hal itu mengakibatkan pasar politik (*electoral market*) terbuka yang menarik pendirian partai baru, memelihara harapan partai-partai kecil dan partai-partai baru dan meraih kekuasaan. Pesatnya peningkatan perolehan suara serta jatuhnya partai membuat sistem menjadi lebih buram bagi masyarakat yang memiliki sedikit waktu untuk mencari tahu perbedaan antar kompetitor. Padahal dengan tingkat volatilitas yang tinggi, kemungkinan perubahan kebijakan dan

hukum menjadi lebih besar mengiringi pergantian anggota badan legislatif. Pengetahuan memproduksi kebijakan dan hukum berjalan seiring pengalaman berpolitik.

Tingginya angka volatilitas disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam kaitan itu, studi Roberts dan Wibbels tentang hubungan antara sistem kepartaian dan *electoral volatility* (di Amerika Latin) sangat relevan karena dikaitkan dengan aspek ekonomi, karakter institusi politik rezim dan sistem kepartaian, serta struktur dan organisasi pembilahan sosial (Roberts dan Wibbels : 1999) . Roberts dan Wibbels menemukan bahwa perubahan signifikan dalam aturan pemilu atau perubahan dalam pemerintahan serta usia partai juga mempengaruhi *electoral volatility*. Selain itu, *electoral volatility* merupakan sebuah fungsi dari gangguan ekonomi jangka pendek, kerapuhan institusi baik dari rezim demokratis maupun sistem kepartaian, dan struktur pembilahan (*cleavage*) yang relatif cair.

Terkait pembilahan sosial, perspektif Daniel Dhakidae menunjukkan partai-partai di Indonesia terbagi ke dalam dua jalur utama: jalur kelas dan aliran (Dhakidae : 1999). Partai yang mengambil jalur kelas membedakan dirinya dan yang lain berdasarkan masyarakat itu atas kelas pemilik modal dan kaum buruh dengan segala kompleksitasnya. Partai yang mengambil jalur aliran membedakan dirinya dengan yang lain berdasarkan

pandangannya terhadap dunia dan persoalannya, dan bagaimana cara memecahkannya.

Pada jalur kelas dipilah menjadi dua kelompok, yaitu pembangunanisme (developmentalisme) dan sosialisme radikal. Menurut Dhakidae, beberapa partai buruh dan partai berideologi marhaenisme masuk dalam kelompok sosialisme radikal. Sementara itu, Golkar adalah representasi dari kelompok pembangunisme yang berpihak kepada pemodal, internasional, dan domestik. Pada jalur aliran, partai-partai dipilah menjadi kelompok agama dan kelompok kebangsaan. Kelompok agama terbagi ke dalam aliran Islam dan Kristen. Partai agama mudah muncul salah satunya karena faktor agama mempermudah menyatukan pendukung sebuah agama. PDIP menjadi kelompok partai berdasarkan kebangsaan. Di antara kedua kelas dan aliran itu, Dhakidae mengidentifikasi kelompok tengah. Kluster tengah ini boleh jadi sebuah *“the golden middle, the radical middle”*, atau *“the intelegent middle”*. Posisi tengah ini merupakan ramuan dari agama, kebangsaan, pembangunanisme dan sosialisme.

Penjelasan kontemporer tentang pembilahan sosial dikemukakan Dodi Ambadi sebagaimana dikutip Pamungkas. Menurut Ambardi pembilahan sosial di Indonesia sampai dengan saat ini terbagi antara pembilahan keagamaan, regional, dan kelas. Dalam perjalannya, dari masa ke

masa semua pembilahan sosial tersebut tidak bertransformasi menjadi partai, tetapi yang pasti adalah pembilahan sosial itu berusaha diaktivasi menjadi kekuasaan partai (Pamungkas :2011).

Teori konflik Clifford Geertz dalam Maswadi Rauf membantu mengurai peta volatilitas pemilih terhadap partai politik dari sudut kebalikannya, loyalitas (Rauf : 2001). Geertz membedakan antara loyalitas politik, loyalitas primordial dan loyalitas politik yang fanatik. Dalam rentang psikologis antara kesetiaan atau ketidaksetiaan pilihan, masing-masing loyalitas itu ditransformasi menjadi pemilih rasional, pemilih primordial dan pemilih rasional fanatik.

Pemilih rasional diidentifikasi sebagai pemilih yang memiliki ikatan, sentimen dan loyalitas yang longgar terhadap partai. Jika partai dan pemimpin partai tidak menunjukkan kinerja yang baik bahkan penuh konflik, pemilih model ini dengan mudah pindah ke partai lain. Pemilih primordial diidentifikasi sebagai pemilih yang memiliki ikatan, sentimen dan loyalitas yang kuat terhadap partai. Jika partai dan pemimpin partai tidak menunjukkan kinerja yang baik bahkan penuh konflik, pemilih model ini tidak mudah pindah ke partai lain. Dan pemilih rasional fanatik diidentifikasi sebagai pemilih yang memiliki ikatan, sentimen dan loyalitas yang longgar tetapi jika situasi menguntungkan ia menunjukkan kefanatikannya. Sikap terhadap konflik partai juga demikian, jika menguntungkan ia tetap di partai

tetapi jika merugikan pemilih model ini akan pindah ke partai lain.

Dari ketiga jenis pemilih di atas, pemilih yang rentan berubah aspirasi politik dan berpindah partai pilihannya adalah pemilih yang memiliki loyalitas rasional dan loyalitas rasional fanatik. Sedang pemilih yang memiliki loyalitas fanatik/primordial adalah pemilih yang sulit berubah dalam memilih partai.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dikombinasikan dengan kualitatif *in numeric* dengan pendekatan deskriptif. Prinsipnya, perubahan angka-angka volatilitas ditafsirkan secara kualitatif. Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dilakukan dengan menggerakkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak (Nawawi : 1985).

Fenomena yang dideskripsikan tentang perubahan kesetiaan pemilih terhadap partai politik (volatilitas) dari pemilu ke pemilu DPRD tahun 2004-2019 di Kabupaten Demak. Komparasi hasil pemilu dilakukan menjawab tentang penyebab dan akibat volatilitas, dan otomatis loyalitas, dengan memeriksa hubungan antar-sebab ataupun munculnya suatu fenomena tertentu dalam jangkauan waktu sekarang.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan laporan-laporan yang ada

hubungannya dengan masalah dalam kajian ini (Denzin dan Lincoln : 1994). Data yang dipakai adalah data sekunder yang berupa data agregat yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Informasi lain dihimpun dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan kajian dari penulisan ini, terutama data-data yang menjelaskan mengenai perubahan kesetiaan pemilih terhadap partai politik (volatilitas). Dari kajian ini dapat diuraikan tujuan yang ingin dihasilkan, yakni untuk memperoleh pemahaman mengenai volatilitas suara dalam pemilu. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan proses pelemagaan partai dan sistem kepartaian. Dari kajian ini diharapkan dapat dihasilkan temuan kebaruan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lanskap dan Konfigurasi Politik Kabupaten Demak 2004-2019

Kabupaten Demak dikenal dengan sebutan Kota Wali karena sejarahnya sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, yang dipelopori oleh Walisongo, pada masa kerajaan abad 14. Selain populer sebagai Kota Wali, Demak dikenal pula sebagai kota santri. Data tahun 2022, sebanyak 99,27 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Demak sebanyak 1.218.890 jiwa beragama Islam. Data BPS Kabupaten Demak tahun 2021 menunjukkan terdapat 729 masjid, 4.156 musholla, 31 gereja dan 1 wihara. Pada tahun 2020, ada sebanyak 180 pondok pesantren. Wajar jika

pengaruh ulama sangat kuat dengan jumlah *nahdliyyin* besar.

Seperti daerah lain di Indonesia, paska reformasi telah digelar lima kali pemilu DPRD Kabupaten Demak. Pada Pemilu 2004, PDIP menjadi pemenang dengan perolehan suara 177.076 atau 16 kursi, disusul PKB dan PPP masing-masing 108.989 suara (9 kursi) dan 82.646 suara (9 kursi). Dengan perolehan suara sebesar 31.469 (3 kursi), eksistensi Demokrat layak dihitung dalam konfigurasi politik Demak karena saat itu merupakan pemilu perdananya, juga melampaui perolehan suara partai-partai yang lebih dulu berkiprah, seperti PKS sebesar 24.959 suara (2 kursi) dan PAN sebanyak 13.145 suara (1 kursi). (lihat Tabel 1)

Pada Pemilu 2009, dominasi PDIP dipatahkan PKB sebagai pemenang dengan suara 100.826 (10 kursi), disusul *runner up* PDIP dengan perolehan 70.687 suara (8 kursi), Golkar mendapat 71.128 suara dan Demokrat mendapat 47.297 suara yang masing-masing setara 6 kursi. Kursi Demokrat itu meningkat dua kali lipat dari Pemilu 2004 walaupun perolehan suaranya hanya naik 15.828 suara. Partai baru besutan eks-PDIP, PDP (Partai Demokrasi Persatuan), mendapatkan 19.635 suara (2 kursi). Perolehan suara PPP turun menjadi 39.772 suara (5 kursi), sedikit di atas perolehan suara PKS sebanyak 39.147 suara (5 kursi). Pada Pemilu 2009 itu, sebagai partai baru, Gerindra berhasil mengalahkan partai-partai lama dengan 21.341 suara (3 kursi).

Tabel 1. Perolehan Suara Partai Politik DPRD Demak Pemilu 2004-2019

Partai	Pemilu 2004		Pemilu 2009		Pemilu 2014		Pemilu 2019	
	Pemilu	Persentase	Pemilu	Persentase	Pemilu	Persentase	Pemilu	Persentase
PKB	108.989	21,95	100.826	21,50	114.742	19,82	124.919	21,03
Golkar	48.207	9,70	71.128	15,16	95.849	16,56	84.145	14,16
PDIP	177.076	35,66	70.687	15,07	85.787	14,82	136.048	22,9
Gerindra			21.341	4,55	98.611	17,04	67.002	11,28
PPP	82.646	16,64	39.772	8,48	53.288	9,21	67.042	11,28
PKS	24.959	5,03	39.147	8,35	39.439	6,81	20.994	
Demokrat	31.469	6,34	47.297	10,08	31.689	5,47	34.003	5,72
PAN	13.145	2,65	16.315	3,48	23.000	3,97	13.551	2,28
Nasdem					36.365	6,28	67.321	11,33
PKPB			13.908	2,96				
Hanura			16.306	3,48				
PDP			19.635	4,19				
PKNU			12.653	2,70				
PBR	10.104	2,03						

Sumber: Data KPU, *diolah*

Pada Pemilu 2014, distribusi suara menjadi relatif merata. PKB tetap mempertahankan kemenangan dengan 114.742 suara (9 kursi), diikuti Golkar sebanyak 95.849 suara (8 kursi), dan PDIP sebanyak 85.787 suara (8 kursi). Suara PPP meningkat sebesar 13.516 suara, dari 39.772 menjadi

53.288 suara walaupun kursinya tetap (5 kursi). Peningkatan suara terbesar diraih Gerindra sebanyak 77.270 suara, dari 21.341 (3 kursi) suara menjadi 98.611 suara (8 kursi). Pada Pemilu 2014, partai baru Nasdem berhasil meraih suara sebesar 36.365 suara (3 kursi).

Pada Pemilu 2019, PDIP berhasil *comeback* meraih kemenangan dengan menaikkan suara sebesar 50.261 suara, dari 85.787 menjadi 136.048 suara (11 kursi), diikuti PKB yang naik sebesar 10.177 suara, dari 114.742 menjadi 124.919 suara (9 kursi). Tak kalah menarik kenaikan suara Nasdem sebanyak 30.956 suara, dari 36.365 menjadi 67.321 suara (6 kursi). Sebaliknya, Gerindra menderita penurunan sebanyak 31.609 suara, dari 98.611 suara (8 kursi) menjadi 67.002 suara (8 kursi). Perolehan suara Golkar juga menurun 11.704 suara, dari 95.849 suara (9 kursi) menjadi 84.145 (7 kursi). Pada Pemilu 2019 itu, PKS memperoleh 20.994 namun kehilangan 4 kursi hasil Pemilu 2014 setara 39.439 suara.

Sekilas perolehan suara empat partai dalam empat pemilu itu semakin stabil, yakni PKB, PPP, Gerindra dan PDIP. Sebenarnya stabilitas suara atau kursi paling nyata terjadi pada PKB dan PPP, partai yang banyak didukung kelompok Islam tradisional atau kaum *nahdliyin* di Demak. Dalam empat kali pemilu, rata-rata kursi PKB 9,25 kursi, dengan rincian 10 kursi (Pemilu 2014) dan 9 kursi (Pemilu 2004, 2019, dan 2019). Rata-rata perolehan PPP 6 kursi,

dengan rincian 9 kursi (Pemilu 2004) dan 5 kursi pada tiga pemilu terakhir (Pemilu 2009, 2014, dan 2019).

Pada Pemilu 2004, ada partai lain yang didukung kaum *nahdliyin*, yakni PBR (Partai Bintang Reformasi), yang meraih 10.104 suara (1 kursi) tapi kemudian kehilangan kursi pada Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, juga kembali muncul partai dukungan kaum *nahdliyin*, yakni PKNU (Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama), berhasil meraih 12.653 suara (1 kursi) tapi tidak berpartisipasi pada pemilu 2014.

Perolehan suara PDIP yang besar pada Pemilu 2004 dan 2019 layak menjadi catatan dalam pemilu DPRD Demak. Pemilu 2019 menandai *comeback* dengan sebanyak 11 kursi, yang naik dari 8 kursi pada Pemilu 2014 dan 2009. Perolehan suara terbesar PDIP diraih pada Pemilu 2004 dengan 16 kursi. Jumlah kursi tersebut terbesar dalam sejarah Pemilu DPRD Demak. Ketika berhasil memenangi pemilu DPRD, PDIP juga berhasil mengantarkan kader-kadernya sebagai kepala daerah (Endang Setyaningdiah pada Pilkada 2001 dan Esti'anah pada Pilkada 2021).

Volatilitas Pemilih

Dari empat pemilu paska reformasi, tingkat *electoral volatility* di Demak tinggi dan fluktuatif. Pada Pemilu 2004, *indeks volatilitas* sebesar 53,36, menurun menjadi 22,93 pada Pemilu 2014, dan kembali naik menjadi 26,51 pada Pemilu 2019. (lihat Tabel 2). Fluktuasi suara ditunjukkan oleh

pemenang pemilu yang berbagi sama antara PKB dan PDIP, dua partai berbeda yang merujuk kategorisasi menurut Daniel Dhakidae, termasuk kelompok keagamaan dan kelompok kebangsaan.

Dengan membandingkan perbedaan tingkat *electoral volatility* dari pemilu ke pemilu, didapati perbedaan stabilitas pola kompetisi antar partai di daerah tersebut yang secara lebih jauh membawa konsekuensi terhadap politik demokrasi lokal. Di sisi lain, tingginya angka volatilitas membawa hasil pemilu yang kurang stabil. Artinya, *electoral market* menjadi lebih terbuka dan tidak dapat diprediksi.

Pemenang pemilu boleh dibagi rata dua kali antara PDIP dan PKB namun perolehan suara PDIP yang sangat besar bisa turun drastis, lebih dari seratus persen. Perolehan suara Golkar, partai yang *notabene* paling lama atau semestinya mapan secara kelembagaan dan mendominasi di era Orde Baru, juga tiba-tiba menurun pada pemilu terakhir. Sebaliknya partai-partai baru bisa tiba-tiba memperoleh suara signifikan padahal belum menunjukkan kinerja apapun. Demokrat, Gerindra dan Nasdem menunjukkan itu pada pemilu perdananya dan semakin solid pada pemilu berikutnya.

Cepat dan mendadaknya peningkatan atau penurunan perolehan suara membuat sistem gagal menjadi parameter pemilih yang memiliki sedikit waktu untuk mencari tahu

perbedaan antar kompetitor. Sistem tidak membantu membuka jalan bagi pikiran kritis dan cerdas untuk membedakan kompetisi pemilu. Data di atas, menunjukkan bahwa hubungan antara partai politik dengan konstituen (masyarakat) di akar rumput –seperti rumusan Robert dan Wibbels– dan identifikasi kepartaian (*party ID*) sebagai bagian pelebagaan partai politik membawa dampak yang signifikan terhadap terjadinya *electoral volatility*. Jarak hubungan partai politik dengan konstituen yang jauh mengonfirmasi penurunan *party ID*. Tidak adanya kedekatan antara konstituen dan partai politik mengakibatkan defisit loyalitas konstituen terhadap partai politik. Pada akhirnya sejumlah besar pemilih akan memilih partai yang berbeda pada saat pemilu. Fenomena yang disebut sebagai *partisan dealignment* ini membawa konsekuensi pada peningkatan *electoral volatility*, *split ticket voting*, dan perubahan pilihan politik.

Dari data terlihat, dalam empat pemilu volatilitas suara partai-partai politik dari terbesar berturut-turut dialami PDIP (28,92), diikuti Gerindra (18,25), PPP (10,96), Golkar (9,44), Demokrat (8,6), dan Nasdem (5,05). Sedangkan volatilitas suara terendah terlihat dari PAN (2,75) dan PKB (3,34). Data itu mengonfirmasi bahwa hubungan partai-partai politik dan konstituen cair, pelebagaan partai dan *party ID* relatif kurang bagus. Hanya sedikit partai politik yang memiliki

kedekatan relasi dengan konstituen (PKB dan PAN). Dengan asumsi proses pelembagaan partai membutuhkan waktu dan proses, jika dipersempit dalam tiga pemilu partai-partai politik yang memiliki indeks volatilitas perolehan suara rendah adalah PAN (1,92), PKB (2,89) dan PPP (2,8).

Menggunakan kategorisasi pembilahan sosial Daniel Dakhidae, data menunjukkan terjadinya pemisahan suara pemilih berdasarkan jalur aliran, dimana partai-partai terpilah menjadi kelompok keagamaan dan kebangsaan. Partai-partai yang berbasis agama Islam, yakni PKB, PPP dan PAN, perolehan suaranya relatif stabil dengan volatilitas yang rendah. Dalam tiga pemilu terakhir, suara ketiga partai itu cenderung stabil, yang menunjukkan kedekatan hubungan partai dengan konstituen. Perbedaan pokok di antara ketiga partai tersebut pada ceruk pemilih pendukungnya. Dengan pemeluk agama Islam sebanyak 99,27 persen, yang mayoritasnya *nahdliyin*, tidak mengherankan jika suara PKB dan PPP besar.

Loyalitas *nahdliyin* yang ada di PKB dan PPP sebenarnya terbagi dua, yaitu loyalitas sebagai kader NU dan loyalitas pendukung partai. Loyalitas sendiri digambarkan sebagai kesetiaan terhadap suatu hal yang bukan hanya berupa kesetiaan fisik semata, namun lebih pada kesetiaan non fisik seperti pikiran dan perhatian. Loyalitas ditentukan oleh beberapa aspek, yakni (1) taat pada peraturan, (2) memiliki

tanggung jawab pada organisasi, (3) kemauan untuk bekerja sama, (4) rasa memiliki, dan (5) hubungan antar pribadi. Loyalitas *nahdliyin* ditandai dengan adanya kesetiaan terhadap para kyai dan istiqomahnya mereka terhadap nilai-nilai keNU-an. Bagi *nahdliyin*, ulama atau kiyai merupakan pemimpin yang sangat karismatik dalam bidang agama. Ini yang menjelaskan PKB dan PPP merupakan partai *established* di Demak.

Sebaliknya partai-partai kelompok kebangsaan dan kelompok tengah, perolehan suaranya fluktuatif sampai sangat fluktuatif, yang ditunjukkan dengan volatilitas yang besar. Tingginya volatilitas itu memperingatkan bahwa perolehan suara PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan bahkan Nasdem bisa sangat besar namun sewaktu-waktu bisa turun drastis. Kompetisi di antara partai-partai tersebut tinggi dan terbuka, karena volatilitas yang tinggi membuka harapan kemajuan partai kecil dan perolehan suara partai baru. *Electoral market* partai-partai kelompok kebangsaan dan kelompok tengah sangat terbuka.

Intersep Politik Lintas Partai

Dengan indeks volatilitas yang tinggi, tak dapat dihindari terjadinya fenomena intersep politik, dimana kinerja elektoral partai yang satu memintas (menahan dan memotong) kinerja elektoral partai lain. Dengan lain kata, perolehan suara suatu partai menahan dan memotong perolehan suara partai lain. Menggunakan

kerangka pembelahan sosial Daniel juga berbasis kelompok keagamaan dan Dhakidae, intersep atau pemintasan kebangsaan. politik pada pemilu DPRD Demak,

Tabel 2. Indeks Volatilitas Pemilu Demak 2004-2019

Partai	Suara	Net	Suara	Net	Suara	Net
	2009	Volatility	2014	Volatility	2019	Volatility
PKB	21,50	-0,45	19,82	-1,68	21,03	1,21
Golkar	15,16	5,64	16,56	1,4	14,16	-2,4
PDIP	15,07	-20,59	14,82	-0,25	22,9	8,08
Gerindra		4,55	17,04	12,49	11,28	-5,76
PPP	8,48	-8,16	9,21	0,73	11,28	2,07
PKS	8,35	3,32	6,81	-1,54		
Demokrat	10,08	3,74	5,47	-4,61	5,72	0,25
PAN	3,48	0,83	3,97	0,23	2,28	-1,69
Nasdem			6,28	6,28	11,33	5,05
PKPB		2,96				
Hanura		3,48				
PDP		4,19				
PKNU		2,70				
PBR		2,03				
		53,36		22,93		26,51

Sumber: Data KPU, *diolah*

Pada Pemilu 2009, suara PDIP turun drastis dengan volatilitas 20,59 bersama dengan peningkatan suara Golkar dengan volatilitas 5,64, Demokrat volatilitas 3,74, dan kehadiran partai-partai baru dengan volatilitas bervariasi: Gerindra 4,55, PDP 4,19, Hanura 3,48, dan PKPB 2,96. Penurunan volatilitas suara PDIP (20,59) di bawah akumulasi kenaikan volatilitas Golkar, Demokrat, Gerindra, PDP, Hanura dan PKPB (24,56). Selisih volatilitas partai kebangsaan itu (+) 3,97. Adapun penurunan perolehan suara PPP dengan volatilitas 8,16, bersama dengan kenaikan volatilitas PAN 0,83 dan PKNU 2,77. Selisih penurunan volatilitas PPP dan

akumulasi kenaikan volatilitas PAN dan PKNU sebesar (-) 4,56. (lihat Tabel 2).

Surplus volatilitas partai-partai kebangsaan 3,97 dan defisit volatilitas partai-partai keagamaan sebesar 4,56 menunjukkan terjadinya intersep politik lintas kelompok partai (dari partai keagamaan ke partai kebangsaan). Artinya, ada pemilih partai keagamaan yang volatilitasnya turun (PPP) yang berubah pilihan dan memilih partai-partai kebangsaan yang mengalami kenaikan volatilitas pada Pemilu 2009. Tepatnya, sejumlah pemilih PPP pada Pemilu 2004 berpindah memilih Golkar, Demokrat, Gerindra, PDP, Hanura, atau PKPB.

Dibanding hasil Pemilu 2004, pada Pemilu 2009 itu PDIP kehilangan 8 kursi sedang total kursi baru partai kebangsaan lain sebanyak 12 kursi, dengan rincian Golkar 2 kursi, Demokrat 3 kursi, Gerindra 3 kursi, PDP 2 kursi, Hanura 1 kursi, dan PKPB 1 kursi. Defisit pertukaran kursi akibat penurunan dan kenaikan volatilitas partai kebangsaan sebanyak 4. Dari mana 4 kursi diperoleh? Pada partai-partai keagamaan, PPP kehilangan 4 kursi, sedang PKNU mendapat 1 kursi dan PAN bertambah 1 kursi, dengan selisih pertukaran 2 kursi. Surplus 2 kursi dari PPP ini menjawab defisit kursi partai kebangsaan. Dengan lain kata, partai-partai kebangsaan yang volatilitasnya naik itu berhasil merebut 2 kursi PPP.

Pada Pemilu 2014, suara PPP meningkat dengan volatilitas 0,73 bersama dengan penurunan suara PKB dengan volatilitas 1,68 dan absennya PKNU (volatilitas 2,70). Selisih volatilitas PPP dari PKB dan PKNU sebesar (-) 3,65. Perolehan suara Gerindra meningkat tajam dengan volatilitas 12,49, Golkar juga meningkat dengan volatilitas 1,4 dan partai bungsu Nasdem volatilitas 6,28. Tidak kebetulan kenaikan suara ketiga partai kebangsaan itu bersama penurunan suara Demokrat dengan volatilitas 4,61, absennya PDP (volatilitas 4,19), gagalnya Hanura (volatilitas 3,48) dan PKPB (volatilitas 2,96). Selisih akumulasi penurunan volatilitas Demokrat, PDP, Hanura, dan PKPB dari kenaikan akumulasi

volatilitas dari Gerindra, Golkar dan Nasdem sebesar (+) 4,93.

Surplus volatilitas partai-partai kebangsaan sebesar 4,93 dan defisit volatilitas partai-partai keagamaan sebesar 3,65 mengonfirmasi terjadinya intersep politik lintas kelompok partai. Artinya, terjadi perpindahan suara pemilih dari partai-partai keagamaan yang volatilitas ke partai-partai kebangsaan yang volatilitasnya naik. Tepatnya, ada banyak pemilih PKB, PKNU dan PKS yang bermigrasi ke partai-partai Golkar, Gerindra, atau Nasdem.

Pada Pemilu 2014 itu, PPP, PKB dan PAN mempertahankan kursi, sedang PKS berkurang 1 kursi, dan PKNU kehilangan 1 kursi. Dengan demikian, kursi partai-partai keagamaan berkurang 2 (PKS 1 kursi dan PKNU 1 kursi). Sementara pada partai-partai kebangsaan, Golkar bertambah 3 kursi, Gerindra 5 kursi, dan Nasdem mendapat 3 kursi, total 11 kursi. Sementara Demokrat kehilangan 4 kursi, PDP 2 kursi, Hanura 1 kursi, dan PKPB 1 kursi, total 8 kursi. Akumulasi penambahan 11 kursi Golkar dan Gerindra, dan Nasdem tidak dicukupi dari akumulasi berkurangnya kursi sebanyak 8 dari Demokrat, PDP, Hanura, dan PKPB. Defisit 3 kursi partai kebangsaan yang volatilitasnya naik diambil dari kursi partai keagamaan (PKS dan PKNU).

PDIP mengalami *comeback* kemenangan pada Pemilu 2019 dengan volatilitas 8,08. Suara Nasdem dan Demokrat juga meningkat masing-

masing dengan volatilitas 5,05 dan 0,25. Sebaliknya, Gerindra dan Golkar menderita karena penurunan dengan volatilitas 5,76 dan 2,4. Akumulasi kenaikan volatilitas PDIP, Nasdem dan Demokrat dibanding akumulasi penurunan volatilitas Gerindra dan Golkar berselisih (+) 5,22. Suara PPP dan PKB mengalami kenaikan masing-masing dengan volatilitas 2,07 dan 1,21. Suara PAN menurun dengan volatilitas 1,69. Selisih penurunan volatilitas PAN dan akumulasi kenaikan volatilitas PKB dan PPP sebesar (+) 1,58.

Surplus volatilitas partai-partai kebangsaan sebesar 5,22 hasil dan surplus volatilitas partai keagamaan sebesar 1,58 menunjukkan sangat tidak signifikannya intersep politik lintas kelompok partai. Artinya, pendukung partai-partai kebangsaan dan keagamaan yang volatilitasnya turun berpindah ke partai-partai kebangsaan dan keagamaan yang volatilitasnya naik. Pemilih Gerindra dan Golkar pada pemilu sebelumnya berpindah ke PDIP, Nasdem atau Demokrat pada Pemilu 2019. Pemilih PKB dan PPP cukup dengan suaranya sendiri. Kalaupun ada perpindahan lintas kelompok, sebagian pemilih PAN berpindah ke Nasdem, Demokrat atau PDIP.

Dibanding hasil Pemilu 2014, kursi partai-partai kebangsaan mengalami redistribusi: kursi PDIP bertambah 3, Nasdem 3, dan Demokrat 1 kursi. Sebaliknya, Golkar turun 2 kursi. Total penambahan kursi PDIP, Nasdem dan Demokrat sebanyak 7 buah terlalu besar dibanding penurunan 2 kursi Golkar. Dari mana 5 kursi lain diperoleh? Pada partai keagamaan, hanya PAN yang kehilangan 1 kursi. Kursi PKB dan PPP tetap. Katakanlah 1 kursi PAN tersebut diambil Golkar, Nasdem atau Demokrat, lalu kekurangan 4 kursi darimana diperoleh?

Besaran volatilitas suara PDIP, Nasdem dan Demokrat yang mengintersep suara Gerindra dan Golkar di atas titik potong menunjukkan adanya pemilih baru PDIP, Nasdem atau Demokrat dari partai lain di luar lingkaran partai kebangsaan. Sepertinya ini bukan intersep politik lintas partai (partai keagamaan ke partai kebangsaan, atau sebaliknya). Fenomena ini adalah berkah untuk PDIP, Nasdem dan Demokrat mendapatkan “durian runtuh” volatilitas dari penderitaan PKS. Pada Pemilu 2019 itu, perolehan suara PKS di atas PAN namun PKS gagal mendapatkan kursi.

Tabel 3. Volatilitas dan Pola Intersep Politik

Kategori	Volatilitas		Pola Intersep Politik
	Partai Kebangsaan	Partai Keagamaan	
Berbeda	Surplus	Defisit	Perpindahan pemilih partai keagamaan ke partai kebangsaan.
Ekuivalen	Surplus	Surplus	Partai kebangsaan dan keagamaan menerima pemilih baru dari partai keagamaan yang “tersingkir”.

Dinamika perubahan volatilitas di atas menjelaskan bahwa perpindahan pilihan akan terus terjadi seiring pergeseran rasionalitas pemilih. Perpindahan pilihan lebih terbuka dan potensial dilakukan pemilih partai-partai kebangsaan. Hal itu mengonfirmasi mudah terjadinya intersep politik di antara partai-partai kebangsaan (PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, dan sebagainya). *Electoral market* yang terbuka pada partai-partai kebangsaan itu memungkinkan munculnya partai baru dengan suara besar yang tiba-tiba.

Partai-partai kebangsaan juga menerima limpahan suara dari pendukung partai-partai keagamaan walaupun jumlahnya semakin tidak kecil. Partai-partai keagamaan, khususnya yang mengandalkan dukungan *nahdliyin* (PKB dan PPP), relatif *established*. Dapat diekstrapolasi, semakin menguat *barrier* struktural yang menghambat terjadinya perpindahan pemilih PKB dan PPP ke partai-partai kebangsaan. Demikian pula, terdapat *barrier* terjadinya intersep politik antara PKB dan PPP. *Electoral market* partai-partai berbasis *nahdliyin* sangat sempit atau malah tertutup.

Dari uraian di atas ditemukan dua hal penting, yakni pola intersep politik dan faktor penyebab dinamika perubahan volatilitas pemilih. Pola intersep politik dikategorikan menjadi (1) ekuivalen dan (2) berbeda (tidak ekuivalen). Baik dalam pola ekuivalen maupun berbeda, partai-partai kebangsaan mendapatkan pindahan atau tambahan suara dari partai keagamaan. (lihat Tabel 3). Pola intersep berbeda: jika volatilitas partai kebangsaan surplus sedang partai keagamaan defisit maka partai kebangsaan mendapat limpahan suara dari partai keagamaan. Pola intersep ekuivalen: jika volatilitas partai kebangsaan surplus dan partai keagamaan surplus maka partai kebangsaan mendapat limpahan suara dari partai keagamaan pula.

Sedang dinamika volatilitas disebabkan siklus politik dan pola pilihan. Siklus politik merujuk pada persepsi pemilih terhadap relasi partai politik lokal dengan momentum dan dinamika politik di tingkat nasional. Di sinilah, fenomena efek ekor jas (*coktail effect*) mendapat penjelasan. Penurunan volatilitas PDIP sebesar 20,59 pada Pemilu 2009 dan kenaikan 8,08 pada Pemilu 2019, misalnya berhubungan

dengan kekalahan Megawati dan kemenangan Joko Widodo dalam Pilpres. Demikian pula dengan kenaikan volatilitas Gerindra sebesar 17,40 pada Pemilu 2014 dan penurunan volatilitas 5,76 tidak lepas dari posisi Prabowo Subiyanto dalam pilpres 2019.

Sedang pola pilihan merujuk pada karakter pemilih dan pola relasi partai dengan pemilih. Menggunakan kategorisasi hasil transformasi teori Geertz tentang loyalitas, dapat diidentifikasi pemilih rasional, pemilih primordial dan pemilih rasional fanatik. Pemilih rasional dan rasional fanatik berkontribusi pada tingginya volatilitas. Secara ekstrapolasi, perpindahan pilihan akan terus terjadi sejalan dengan peningkatan rasionalitas pemilih. Tapi pengaruh dan besaran kelompok pemilih rasional jauh di bawah pemilih rasional fanatik dan apalagi pemilih primordial.

Lapisan pertama adalah pemilih primordial, yakni pemilih yang memiliki ikatan, sentimen, loyalitas kuat terhadap suatu partai, dan tidak mudah berganti pilihan. Kelompok pemilih ini nampak pada partai yang dicirikan volatilitas relatif konstan atau stabil, seperti PKB, PPP, dan PAN, yang bukan kebetulan termasuk partai keagamaan. Dalam jumlah yang sulit diprediksi, pemilih primordial juga menjadi pendukung basis pada partai kebangsaan dengan volatilitas fluktuatif seperti PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Nasdem, yang

bukan kebetulan pula termasuk partai kebangsaan.

Lapisan berikut adalah pemilih rasional, yakni pemilih yang memiliki ikatan, sentimen, loyalitas longgar terhadap suatu partai, tidak segan bermigrasi pilihan jika partai dan elitnya gagal menunjukkan kinerja yang baik, tidak merawat konstituen, dan apalagi terlibat korupsi dan *gonjang-ganjing*. Isu-isu dan kebijakan sangat mempengaruhi pilihan mereka. Kelompok pemilih ini lebih tertarik pada partai terbuka, yang bukan kebetulan kebanyakan partai kebangsaan. Karena kurang bagusnya pelembagaan partai, terbuka dan intensnya relasi partai elite dan konstituen, dan turunnya *ID party* pada partai-partai yang ada sehingga kelompok pemilih ini berjalan dengan momentum, situasi yang sejatinya kurang rasional. Ini yang dijelaskan dari *comeback*-nya PDIP dan sukses Nasdem pada Pemilu 2019.

Lapisan terbesar adalah pemilih rasional fanatik, yakni pemilih yang memiliki ikatan, sentimen dan loyalitas longgar tetapi jika situasi menguntungkan akan menunjukkan fanatismenya. Sikap terhadap konflik partai juga demikian, jika menguntungkan mereka loyal tetapi jika merugikan akan berpindah partai. Hal ini dikonfirmasi pada partai-partai yang mengalami peningkatan volatilitas setelah terpuruk, seperti PPP pada Pemilu 2014, PDIP pada Pemilu 2014 dan 2019, serta Demokrat dan Gerindra pada Pemilu 2019.

KESIMPULAN

Indeks volatilitas pemilu DPRD Demak masih tinggi dan fluktuatif, dengan rata-rata 34,26 dalam empat pemilu terakhir. Pemilu 2004, indeks volatilitas sebesar 53,36, menurun menjadi 22,93 pada Pemilu 2014, dan kembali naik menjadi 26,51 pada Pemilu 2019. Perbandingan tingkat *electoral volatility* dari pemilu ke pemilu memperlihatkan perbedaan stabilitas pola kompetisi antarpolisi di daerah tersebut yang lebih jauh membawa konsekuensi terhadap politik demokrasi lokal. Tingginya volatilitas menunjukkan belum bagusnya relasi partai dan konstituen, pelembagaan partai, dan *ID Party*, yang membawa hasil pemilu yang kurang stabil. Namun hal itu menunjukkan *electoral market* yang terbuka dan tidak dapat diprediksi.

Volatilitas yang tinggi berhubungan secara timbal balik dengan intersepsi politik, dimana partai yang satu memintas partai lain. Atau perolehan suara suatu partai menahan atau memotong suara partai lain. Semula intersepsi politik terjadi lintas partai, dengan partai kebangsaan yang mendapatkan berkah limpahan suara. Dalam perkembangan terakhir, intersepsi politik lebih terjadi antarpolisi kebangsaan seiring melembaga dan stabilnya partai-partai keagamaan (PKB, PPP, PAN). Intersepsi politik antarpolisi keagamaan tidak signifikan.

Perpindahan atau perubahan pilihan politik akan terus terjadi sejalan

dengan peningkatan rasionalitas dan persepsi pemilih. Perpindahan pilihan lebih mudah dilakukan pemilih partai-partai kebangsaan (PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, dan lain-lain). Hal itu mengonfirmasi keterbukaan *electoral market* partai-partai kebangsaan, yang memungkinkan munculnya partai baru dengan suara besar.

Dinamika volatilitas pemilih didorong oleh siklus politik dan pola pilihan. Siklus politik merujuk pada persepsi pemilih terhadap relasi partai politik lokal dengan momentum dan dinamika politik di tingkat nasional. Sedang pola pilihan merujuk pada karakter pemilih dan pola relasi partai dengan pemilih.

Dari rentang psikologis antara loyalitas dan volatilitas pemilih pemilu Demak, didapatkan pemilih rasional yang terbatas dibanding pemilih primordial dan pemilih rasional fanatik. Pemilih rasional dan rasional fanatik berkontribusi pada tingginya volatilitas. Secara ekstrapolasi, perpindahan pilihan akan terus terjadi sejalan dengan peningkatan rasionalitas pemilih. Tapi pengaruh dan besaran kelompok pemilih rasional jauh di bawah pemilih rasional fanatik dan apalagi pemilih primordial.

Kelemahan penelitian ini tidak mengukur indeks volatilitas di level lebih mikro (kecamatan atau dapil), tidak memisahkan isu dan kebijakan daerah dan pusat, dan tidak mengaitkan volatilitas dengan efek ekor jas (*cocktail effect*) karena pemilu legislatif

dibarengkan pilpres. Ke depan perlu studi yang mengukur indeks volatilitas pada level lebih mikro sehingga diperoleh peta volatilitas yang lebih detail dan presisi, memisahkan isu dan kebijakan daerah dan pusat sehingga bisa dipetakan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, dan melihat pengaruh efek ekor jas terhadap suara pemilih sehingga fenomena demokrasi politik lokal dapat dijelaskan lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S. (ed). (1994), *Handbook of Qualitative Research*, London : Sage Publication.
- Dhakidae, Daniel. (1999), *Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi, dan Program*, Jakarta : Kompas.
- Jainuri. (2011) "Analisis Loyalitas dan Volatilitas Pemilih Partai di Kota Malang", *Jurnal Sospol*, (Volume 1, No.2)
- Mainwaring, Scott.(1997), *Multipartism, Robust, Federalism and Presidentilism in Brazil*, Cambridge University Press, 61-62.
- Mainwaring, Scott and Torcal , Mariano. (2005), *Party Systems Institutionalization and Party System Theory After The Third Wave Of Democratization*, The Hellen Kelog Institute For International Studies.
- Nasir, Nurlatipah. (2016). "Electoral volatility dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik dengan Konstituen", *Jurnal Politik Profetik*, STISIP Tasikmalaya (Volume 04, No. 1)
- Nawawi, Hadari .(1985), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yoyakarta: UGM Press.
- Pamungkas, Sigit. (2011), *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism.
- Rauf, Maswadi. (2001), *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penajakan Teoritis*. Jakarta: Dirjen Dikti).
- Roberts. Kenneth M and Wibbels, Erik. (1999), *Party System and Electoral Volatility in Latin America: A Test of Economic, Institutional, and Structural Explanations*.(American Political Science Association.